

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Peringkat atas Kredit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

***irAA*/Stabil**

Periode Pemingkatan

13 November 2024 – 1 November 2025

“Obligor dengan peringkat *irAA* memiliki tingkat kapabilitas sangat tinggi dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Hanya terdapat sedikit perbedaan terhadap skala peringkat Obligor dengan tingkat kualifikasi tertinggi.”

Kredit Rating Indonesia telah menetapkan peringkat ‘*irAA*’ kepada Kredit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Kredit Rating Indonesia telah menetapkan peringkat ‘*irAA*’ kepada Kredit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan *outlook* Stabil. Peringkat atas Kredit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mencerminkan perekonomian daerah yang sangat kuat, fleksibilitas anggaran yang kuat dan rendahnya tingkat utang.

Obligor dengan peringkat *irAA* memiliki tingkat kapabilitas sangat tinggi dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Hanya terdapat sedikit perbedaan terhadap skala peringkat Obligor dengan tingkat kualifikasi tertinggi. Hal ini mencerminkan risiko finansial yang minimal dan soliditas dalam pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan populasi mencapai 49,9 juta jiwa pada tahun 2023. Wilayah ini memiliki luas daratan sebesar 5.349 kilometer persegi dan memberikan kontribusi sebesar 12,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendominasi pendapatan daerah Jawa Barat dengan kontribusi yang meningkat dari 58,9% pada tahun 2019 menjadi 70,1% pada tahun 2023, mencerminkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Sementara itu, kontribusi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan, mengindikasikan berkurangnya ketergantungan pada dana pusat dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal belanja pegawai, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi terendah dibandingkan dengan provinsi lain, yakni 20,1% pada tahun 2023. Porsi belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai target 40% yang ditetapkan, meskipun alokasinya lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana untuk meningkatkan porsi belanja infrastruktur secara bertahap hingga mencapai target pada tahun 2027, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Peringkat Kredit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat ditingkatkan apabila terdapat peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, dan fleksibilitas fiskal, serta upaya pengelolaan utang yang tetap terkendali. Sebaliknya, penurunan peringkat dapat terjadi jika terjadi penurunan kinerja ekonomi yang substansial dibandingkan daerah lain, peningkatan beban utang, dan menurunnya pendapatan asli daerah secara signifikan yang berdampak pada ketidakstabilan fiskal.

Ikhtisar Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Total Pendapatan (Rp, Tn)	34,8	33,2	37,0	34,5	36,0
Total Belanja (Rp, Tn)	35,5	32,8	37,5	38,1	35,8
Pendapatan Asli Daerah (Rp, Tn)	24,4	23,2	20,3	18,5	21,2
Belanja Operasional (Rp, Tn)	19,1	17,2	23,4	21,1	19,9
Belanja Modal (Rp, Tn)	2,5	2,4	2,0	1,7	2,5
PDRB – ADHB (Rp, Tn)	2.625,22	2.422,78	2.204,66	2.082,11	2.123,15
PDRB – ADHB per Kapita (Rp, Juta)	52,6	49,1	45,3	43,2	43,3
Total Penduduk (Juta Orang)	49,9	49,3	48,7	48,2	49,0
PAD terhadap PDRB (%)	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,45	3,74	-2,52	5,02
Tingkat Inflasi (%)	2,58	6,04	1,69	2,18	3,21
Kurs Valuta Asing (USD/IDR)	15.416	15.508	14.215	14.105	13.901

Analisis : Gromy Pilipi Pranata Purba (gromy.purba@kreditratingindonesia.com)
Samuel Aditya Pangestu Sitorus (samuel.sitorus@kreditratingindonesia.com)

DISCLAIMER

PT Kredit Rating Indonesia (KRI) does not represent or warrant or guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the contents of this report or publication. KRI does not perform an audit and does not undertake due diligence or independent verification of any information used as the basis of and presented in this report or publication. Although the information upon which KRI rating report are based, and any other contents provide in this rating report is obtained by KRI from sources which KRI believes to be reliable.

KRI will be held harmless against any responsibility arising from its use, its partial use, or its lack of use, in combination with other products or used solely, nor can it be held responsible for the result of its use or lack of its use in any investment or other kind of financial decision making on which this report or publication is based. The issuance of a solicited or unsolicited rating report does not supply financial, legal, tax or investment consultancy. The rating report is not an opinion as to the value of securities, therefore KRI is not responsible for any credit, loan or investment decision, damages or other losses resulting from the reliance upon or use of this report.

In no event shall KRI be held liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses including but not limited to lost profits and opportunity costs in connection with any use of the contents of this rating report or publication.

Credit analyses, including ratings, and statements in this report or publication are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell any securities or to make any investment decision. Therefore, this report may not reflect any event or circumstances which occur after the date of this report.

KRI also assumes no obligation to update the content following publication in any form. KRI does not act as fiduciary or an investment advisor. KRI keeps the activities of its analytical units separate from its business units to preserve independence and objectivity of its analytical process and products. As a result, certain units of KRI may have information that is not available to other units. KRI has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information received in connection with each analytical process. KRI may receive compensation for its ratings and other analytical work, normally from issuers of securities. KRI reserves the right to disseminate its opinions and analyses. KRI's public ratings and analyses are made available on its website, <http://www.kreditratingindonesia.com> (free of charge) and through other subscription based services, and may be distributed through other means, including via KRI publications and third party redistributors. Information in KRI's website and its use fall under the restrictions and disclaimer stated above. No part of KRI's website, the content of this report, may be reproduced or transmitted by any means, electronic or non-electronic whether in full or in part, will be subjected to written approval from KRI.